

Belanja Modal- Rp 30 Miliar untuk Rampungkan Jembatan Bialo



Sumber gambar:

<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/01/02/rp-30-miliar-untuk-rampungkan-jembatan-bialo/>

Pembangunan **Jembatan Bialo** yang sempat terhenti akan kembali dilanjutkan tahun ini. Jembatan yang bakal menjadi akses alternatif ini dianggarkan sebesar Rp 30 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Bupati **Bulukumba**, Andi Muchtar Ali Yusuf saat Dzikir Akbar Akhir Tahun di Top Floor Gedung Satap **Bulukumba**, Minggu, 31 Desember 2023. Dikatakan, pemerintah daerah telah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan jembatan yang telah dimulai sejak 2019 lalu.

"Jalan (pantai) Merpati kita akan rampungkan dengan anggaran Rp 14 miliar, perkiraan **Jembatan Bialo** Rp 30 miliar. Anggarannya dari mana? Yang lalu-lalu juga pembangunan bisa selesai, semoga kembali ada dari langit," kata Andi Utta sapaan Muchtar Ali Yusuf.

Selain **Jembatan Bialo**, lanjut Andi Utta, beberapa bangunan monumental lainnya juga akan dirampungkan. Seperti bangunan Pasar Sentral dan Pasar Tanete di Kecamatan Bulukumpa, dengan harapan ekonomi dan daya beli masyarakat **Bulukumba** semakin meningkat.

"Termasuk kolam parkir (labuh) yang luasnya 10 hektar bisa rampung lewat bantuan anggaran pemerintah provinsi, sehingga lebih banyak kapal bisa bersandar dan bisa meningkatkan ekonomi," tambahnya.

Diketahui, Pembangunan **Jembatan Bialo** sempat dianggarkan untuk tahap keempat pada tahun 2021, dengan total anggaran sekira Rp 30 miliar. Namun pandemi Covid-19 yang melanda, anggarannya dialihkan ke pembangunan lain.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) **Bulukumba**, Sapriadi, juga mengatakan, dalam program pembangunan **Jembatan Bialo** dilakukan revitalisasi desain. Hal

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

ini dilakukan untuk mengefektifkan fungsi jembatan yang sebelumnya hanya sebagai jalur alternatif menjadi kawasan jembatan wisata.

"Tetap ada anggaran untuk kegiatan, tapi kegiatannya itu untuk redesain," paparnya.

Selain itu, pembangunan jembatan tersebut juga akan dipaketkan dengan pembangunan tanggul penahan ombak. Begitu pun pembukaan jalur sepanjang kurang lebih 5 kilometer mulai dari Jalan Menara, Bintarore hingga Pelabuhan Leppe.

Berdasarkan rencana tersebut, proyek tersebut ditaksir memakan anggaran sebesar kurang lebih Rp200 miliar. Olehnya, Pemerintah Kabupaten [Bulukumba](#) rencananya akan membangun proyek tersebut menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

"Saat ini sementara kita usulkan anggaran ke pemerintah pusat dan direspon dengan baik. Kalau usulan itu diterima maka tahun 2024 akan dikerjakan," harap Sapriadi.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/01/02/rp-30-miliar-untuk-rampungkan-jembatan-bialo/>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1 c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

